

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.12/PMK.02/2018.

Belanja pada pemerintah pusat sudah ditentukan anggarannya dalam APBN untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyeknya selama satu tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Belanja modal terkait langsung dan dipergunakan untuk operasional kegiatan suatu satuan kerja untuk memperoleh aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap negara dan/atau aset tetap lainnya dan mengurangi kas negara. BBP2TP dalam mengoptimalkan kegiatannya untuk mengembangkan teknologi pertanian membutuhkan dukungan belanja modal, salah satunya berupa mesin dan peralatan yang dapat menunjang proses kegiatan satuan kerja. Belanja modal rawan dengan kesalahan karena jumlahnya yang cukup besar dan spesifikasi barang yang tidak sesuai ketika pemesanan, sehingga perlu memperhatikan setiap sistem dari awal yang dimulai dari perencanaan anggaran, kontrak kerja antara satuan kerja dengan penyedia, dan spesifikasi aset tetap.

Sistem akuntansi sangat penting karena membuat siklus bisnis menjadi lebih jelas dan terstruktur karena setiap proses memiliki tahapan sistematis dan didokumentasikan, dengan demikian dapat mudah dicari apabila dibutuhkan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.215 /PMK.05/2016 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut SAPP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat. SAPP terbagi menjadi 2 subsistem yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN).

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) sebagai Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) berbasis Akrual. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis



Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAIBA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Atas dasar pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Sistem Akuntansi Belanja Modal pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) Kota Bogor”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah yang penulis akan bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi belanja modal pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)?
2. Apa saja fungsi yang terkait dalam pelaksanaan sistem akuntansi belanja modal pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)?
3. Apa saja dokumen dan catatan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi belanja modal pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)?
4. Bagaimana prosedur akuntansi belanja modal pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)?
5. Bagaimana pengendalian internal di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)?

## 1.3 Tujuan

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan diantaranya:

1. Menjelaskan kebijakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi belanja modal pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)
2. Menguraikan fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi belanja modal pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)
3. Menguraikan dokumen dan catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi belanja modal pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)
4. Menjelaskan sistem akuntansi belanja modal pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)
5. Menjelaskan pengendalian internal di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

## 1.4 Manfaat

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan tentang ilmu pengetahuan untuk sistem akuntansi belanja modal.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan sistem akuntansi belanja modal khususnya pada satuan kerja kuasa pengguna anggaran serta menjadi bahan kajian yang lebih lanjut.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Sekolah Vokasi IPB  
Dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan masukan serta referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem akuntansi belanja modal.
- b. Bagi Penulis  
Menambah wawasan, memperoleh tambahan ilmu, dan meningkatkan keterampilan dalam keadaan nyata dunia pekerjaan khususnya pemerintahan sehingga penulis mendapatkan ilmu dan gambaran baru dari penerapan teoritis pada saat perkuliahan.
- c. Bagi Instansi  
Dapat dijadikan masukan dalam perbaikan kinerja pengelolaan keuangan serta dapat dijadikan sumber referensi informasi instansi dalam pengelolaan akuntansi khususnya mengenai akuntansi belanja modal.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Belanja Modal

Belanja modal pada sektor swasta tentu saja berbeda dengan belanja modal pada sektor pemerintahan karena basis akuntansi yang digunakan berbeda. Dimana sektor swasta menggunakan basis akrual, sedangkan sektor pemerintahan menggunakan basis kas menuju akrual (*Cash Toward Accrual*) dan basis akrual.

Belanja modal menurut Menurut Erlina (2015:155) Belanja Modal adalah “pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud”.